PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MELALUI HUKUM PIDANA

Ardyani Lumban Tobing¹, Aulia Fitriani Kusuma², Salsabilla Erika Dwi Putri³,
Mulia Akbar Santoso⁴

ardyanitobing@gmail.com¹, auliafk2003@gmail.com², salsabillaerikadwiputri@gmail.com³,
muliaakbarsantoso@umri.ac.id⁴

Universitas Muhammadiyah Riau

ABSTRAK

Penegakan hukum lingkungan sebagai suatu tindakan dan/atau proses paksaan untuk mentaati hukum yang didasarkan kepada ketentuan, peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan-persyaratan lingkungan. Penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen untuk menjamin terciptanya efek jera demi terwujudnya lingkungan hidup yang sehat serta hutan yang lestari. Penerapan hukum pidana merupakan bagian dari upaya represif dalam menindak kejahatan (*rechdelicten*) dan pelanggaran (*wetsdelicten*). Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memuat ancaman pidana sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal adalah pidana penjara dan denda. Beberapa hambatan dalam penegakan hukum lingkungan hidup diantaranya: sarana hukum, aparat penegak hukum, fasilitas dan sarana, perizinan, sistem Amdal, dan kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan.

Kata Kunci: Penegakan, hukum lingkungan, hukum pidana.

Abstract

*Environmental law enforcement as an action and/or process of compulsion to comply with the law based on provisions, laws and regulations and/or environmental requirements Criminal law enforcement in the environmental sector is one of the instruments to ensure the creation of a deterrent effect for the realisation of a healthy environment and sustainable forests. The application of criminal law is part of the repressive efforts in cracking down on crimes (*rechdelicten*) and offences (*wetsdelicten*). Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, contains criminal threats as stated in the articles are imprisonment and fines. Some obstacles in environmental law enforcement include: legal means, law enforcement officials, facilities and facilities, licensing, EIA system, and public legal awareness of the environment.*

Keywords: Enforcement, environmental law, criminal law

PENDAHULUAN

Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, maka perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, berdasarkan kebijaksanaan nasionak yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa mendatang. Untuk itu dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan-an berwawasan lingkungan.

Pada tingkat nasional kesadaran lingkungan hidup telah diwujudkan dalam berbagai peraturan perundangan-undangan dan kebijakan di bidang lingkungan hidup seperti UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Lingkungan Hidup yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selanjutnya undang-undang tersebut disempurnakan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH) yang berlaku hingga saat ini

Lingkungan hidup bukan hanya menjadi permasalahan bangsa Indonesia saja, namun telah menjadi isu global negara-negara di dunia yang harus ditanggulangi bersama seluruh umat manusia di muka bumi. Kesadaran lingkungan yang bersifat global ini telah dituangkan dalam berbagai konferensi Internasional, Regional dan Nasional. Konferensi Internasional pertama mengenai lingkungan hidup diselenggarakan di Stockholm Swedia pada tahun 1972 yang terkenal dengan Deklarasi Stockholm, dua puluh tahun kemudian tepatnya tahun 1992 diadakan Deklarasi Rio De Janeiro di Brazil adalah merupakan konferensi PBB mengenai Lingkungan Hidup kedua yang lazim disebut Konferensi Tingkat Tinggi Bumi, dilanjutkan KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg Afrika Selatan pada Tahun 2002 dan Bali Road Map Tahun 2007 di Bali Indonesia.

Penegakan hukum lingkungan sebagai suatu tindakan dan/atau proses paksaan untuk mentaati hukum yang didasarkan kepada ketentuan, peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan-persyaratan lingkungan. Undang-undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah menegaskan 3 (tiga) langkah penegakan hukum secara sistematis, yaitu mulai dengan penegakan hukum administratif, penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dan penyidikan atas tindak pidana lingkungan hidup

Pandangan yang keliru pada masa lalu bahwa penegakan hukum lingkungan hanya dapat dilakukan melalui proses pengadilan. Kondisi ini sejalan dengan penegakan hukum-hukum lingkungan yang lebih refresif, yaitu setelah terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan baru diselesaikan melalui jalur pengadilan, baik dari segi pidana maupun perdata

Salah satu kasus penegakan hukum pidana lingkungan yang terjadi di Bengkalis Provinsi Riau yaitu PT. SIPP merupakan pabrik kelapa sawit (crude palm oil) Perusahaan tersebut dilaporkan telah melakukan pencemaran lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Sebelumnya, PT. SIPP telah dikenakan sanksi administratif oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, namun tidak patuh. Atas tindakannya, pelaku akan disangkakan melanggar Pasal 98 dan/atau Pasal 104 jo Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP. "Ancaman bagi yang melanggar Pasal 98 berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan/atau Pasal 104 berupa ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dengan denda paling banyak Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah), .

Lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 membawa harapan baru dalam penegakan hukum pidana lingkungan, karena Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum disamping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi.

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui penegakan dan hambatan dalam penegakan hukum lingkungan melalui hukum pidana

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan dalam beberapa hal mengatur secara tegas apa yang dibolehkan untuk dilakukan oleh masyarakat terhadap lingkungan dan apa yang dilarang untuk dilakukan masyarakat terhadap lingkungan hidup. Hukum lingkungan memiliki peran yang strategis dalam menunjang dan menjaga kelangsungan hidup manusia dan lingkungannya. Hukum Lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup, hukum lingkungan pada hakekatnya merupakan suatu bidang hukum yang dikuasai oleh kaidah-kaidah hukum tata usaha negara atau hukum pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang tindak pidana dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Disamping undang-undang ini, ada pula perundang-undangan pidana lingkungan yang diatur dalam undang-undang sektoral, yaitu antara lain; Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 11 tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha-Usaha Bagi Umum, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Pokok Kehutanan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (disebut Undang-Undang Konservasi Hayati), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, Perda Provinsi dan Kabupaten Kota yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Perbuatan hukum yang dimaksud berupa pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam undang-undang PPLH. Sedikitnya ada 7 ketentuan yang dapat menjadi pidana jika ketentuan dilanggar oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Ketentuan yang dimaksud adalah:

- a. Ketentuan tentang baku mutu
- b. Ketentuan tentang rekayasa genetika
- c. Ketentuan tentang Limbah
- d. Ketentuan tentang Lahan
- e. Ketentuan tentang Izin Lingkungan
- f. Ketentuan tentang Informasi Lingkungan Hidup

Istilah penegakan hukum dalam Bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan paksaan sehingga ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Penegakan hukum memiliki arti yang sangat luas meliputi segi preventif dan represif, cocok dengan kondisi Indonesia yang unsur pemerintahnya turut aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat (Silalahi, 2001)

Dengan demikian penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sarana administratif, keperdataan dan kepidanaan. Undang-Undang No.23 Tahun 1997 menyediakan tiga macam penegakan hukum lingkungan yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana.

Penegakan hukum lingkungan kepidanaan tidak lain adalah penegakan terhadap ketentuan-ketentuan pidana dari hukum lingkungan. Substansi, wewenang kelembagaan, dan prosedur yang digunakan secara umum tunduk pada ketentuan hukum lingkungan kecuali jika hal itu belum diatur secara khusus. Dalam hal demikian, maka yang digunakan adalah ketentuan yang berlaku dalam hukum pidana pada umumnya, misalnya mengenai lembaga peradilan, personil, dan hukum acara yang berlaku.

Penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen untuk menjamin terciptanya efek jera demi terwujudnya lingkungan hidup yang sehat serta hutan yang lestari. Penerapan hukum pidana merupakan bagian dari upaya represif dalam menindak kejahatan (*rechdelicten*) dan pelanggaran (*wetsdelicten*). Mengingat pentingnya hukum pidana untuk perubahan perilaku, beberapa kalangan bahkan menyebut hukum pidana sebagai “the real law enforcement”.

Dari perspektif hukum lingkungan, instrumen pidana ditujukan untuk melindungi kepentingan lingkungan dari ancaman perusakan dan/atau pencemaran. Dengan diberlakukannya sanksi pidana, maka diharapkan terciptanya pencegahan atau setidaknya mengurangi jumlah tindak kejahatan serta melindungi hak-hak masyarakat luas dari gangguan dan kesewenang-wenangan (Syahrin, 2009)

Penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan dilakukan secara terpadu mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan eksekusi putusan pengadilan. Giat penyidikan diselenggarakan oleh Penyidik Kepolisian serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang bernaung pada instansi pemerintah pusat dan daerah; proses penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum; tahapan pemeriksaan perkara dan putusan pengadilan merupakan kewenangan Hakim; dan pelaksanaan putusan hakim merupakan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum dan Lembaga Pemasyarakatan. Di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, hukum pidana tidak hanya berbicara mengenai sanksi pidana penjara dan denda, namun juga dapat diterapkan pidana tambahan khususnya tanggung jawab dalam memulihkan lingkungan.

Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah adanya penguatan tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Sanksi pidana lingkungan hidup yang terdapat dalam KUHP diatur dalam Pasal 203 KUHPidana yang berbunyi; Barangsiapa karena kealpaannya sesuatu bahan termasuk ke dalam sumur, pompa, mata air, atau dalam tempat persediaan air minum bagi keperluan umum atau untuk dipakai oleh atau bersama sama dengan orang lain, sehingga air itu berbahaya untuk kesehatan orang lain, dihukum penjara selama lamanya Sembilan bulan atau kurungan selama lamanya enam bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp 4.500.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam Bab IX, Pasal 41, 42, 43, 44,45,46, 47, 48. Secara khusus dalam tindak pidana kealpaan dalam Pasal 44 ayat (1) UUPH yang menerangkan ; Barangsiapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diancam

dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.00 (seratus juta rupiah)

Hambatan dalam Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Hukum Lingkungan

Faktor kendala dan hambatan penegakan hukum lingkungan hidup mengakibatkan tidak efektifitasnya faktor pendukung dalam penegakan hukum lingkungan. Banyak peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, namun pelaksanaannya dilapangan masih banyak kendala dan hambatan yang ditemui. Kendala dan hambatan itu terletak pada faktor, yaitu: (Hendrawan, 2010)

1. Sarana Hukum

Sarana hukum merupakan faktor kendala dan hambatan dalam penegakan hukum lingkungan. Berbagai kebijakan operasional yang dikeluarkan seringkali tidak konsisten dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didalam UU No. 32 Tahun 2009 maupun UU yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup lainnya. Bahwa dalam upaya penegakan hukum lingkungan, faktor manusia sebagai pelaksanaannya akan lebih banyak membentuk keberhasilan penegakan hukum dibandingkan dengan faktor hukum itu sendiri

2. Aparat Penegak Hukum

Banyak kasus-kasus lingkungan terkendala dikarenakan jumlah aparat penegak hukum profesional yang mampu menangani kasus-kasus lingkungan masih sangat terbatas. Disamping itu adalah mustahil kiranya kita mengharapkan para penegak hukum itu dapat menguasai berbagai aspek lingkungan. Karena lingkungan hidup mencakup aspek yang sangat luas dan kompleks yang berkenaan dengan berbagai disiplin ilmu. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman aspek-aspek lingkungan oleh penegak hukum menjadi faktor kendala yang sangat dominan dalam upaya untuk menciptakan kesamaan persepsi penanganan perkara lingkungan.

3. Fasilitas dan Sarana

Fasilitas dan sarana adalah alat untuk mencapai tujuan penegakan hukum lingkungan. Ketiadaan atau keterbatasan fasilitas dan sarana penunjang (termasuk dana), akan sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum lingkungan. Bahwa kenyataan menunjukkan dalam penanganan kasus-kasus lingkungan akan melibatkan berbagai perangkat berteknologi canggih (peralatan laboratorium), yang untuk kepentingan operasionalisasinya memerlukan tenaga ahli dan biaya cukup mahal.

4. Perizinan

Perizinan memang menjadi salah satu masalah yang lebih banyak memberi peluang bagi berkembangnya masalah lingkungan ketimbang membatasinya. Sebab Pasal 36 UU No. 32 Tahun 2009 masih bisa dilewati begitu saja oleh pengusaha, apalagi jika izin yang dimaksud adalah izin yang diberikan oleh Departemen Perindustrian, setelah sebuah perusahaan siap berproduksi.

5. Sistem AMDAL

Dalam prakteknya, AMDAL lebih mengarah pada penonjolan pemenuhan ketentuan administratif daripada substantifnya. Artinya pesatnya permintaan akan AMDAL merupakan mata rantai kewajiban dalam urusan perizinan dalam suatu usaha atau dipandang sebagai performa untuk mendapatkan akad kredit atau izin investasi. Proses transparansi dan mekanisme keterbukaan dokumen AMDAL bagi masyarakat tidak berjalan sesuai harapan, bahkan masyarakat (yang terkena dampak tidak mengetahui secara pasti adanya suatu aktifitas kegiatan).

6. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Lingkungan

Kepatuhan dan ketaatan kepada ketentuan hukum (lingkungan), merupakan indikator kesadaran hukum masyarakat. Peranserta masyarakat, menurut undang-undang

pengelolaan lingkungan hidup merupakan komponen utama, disamping keberadaan penegak hukum, untuk tercapainya tujuan hukum melalui sarana penegakan hukum, dengan cara melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

KESIMPULAN

Penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen untuk menjamin terciptanya efek jera demi terwujudnya lingkungan hidup yang sehat serta hutan yang lestari. Penerapan hukum pidana merupakan bagian dari upaya represif dalam menindak kejahatan (*rechdelicten*) dan pelanggaran (*wetsdelicten*). Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memuat ancaman pidana sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal adalah pidana penjara dan denda. Beberapa hambatan dalam penegakan hukum lingkungan hidup diantaranya: sarana hukum, aparat penegak hukum, fasilitas dan sarana, perizinan, sistem Amdal, dan kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan

DAFTAR PUSTAKA

- Hendrawan. Beberapa Tantangan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (<https://www.sembilanbintang.co.id/beberapa-tantangan-penegakan-hukum-lingkungan-hidup>)
<https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7087/dua-tersangka-pencemaran-lingkungan-hidup-di-riau-segera-disidangkan>
- Silalahi, M. Daud (2001) Hukum Lingkungan Dalam Sistem penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Alumni Bandung, 2001
- Syahrin. A. (2009) Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan. Jakarta: Sofmedia.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-undang Nomor. 23 Tahun 1997. Pengelolaan Lingkungan Hidup.